

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan fisik fasilitas kota baik berupa gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, hotel-hotel, perumahan, dan lain sebagainya merupakan satu hal yang tidak bisa diabaikan dalam perkembangan berkelanjutan di hunian populasi penduduk termasuk Kota Yogyakarta, serta pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya menyebabkan lahan hunian semakin sempit dan sesak. Kota Yogyakarta yang merupakan bentuk representasi dari wujud kota pendidikan dan kota pariwisata yang kaya akan kebudayaan di Indonesia, yang hanya memiliki luas wilayah sebesar 3.250,00 Ha atau 32,50 km² (1,02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)¹, ditambah pertumbuhan penduduk lokal yang meningkat tiap tahunnya dengan jumlah kepadatan 11.957,75 orang/km², jumlah pendatang yang menetap untuk mengenyam pendidikan juga semakin meningkat, serta kunjungan wisatawan yang semakin ramai menyebabkan kebutuhan masyarakat akan ruang public semakin sempit dan sangat terbatas., termasuk kebutuhan akan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan data dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, terdapat 64 hotel baru yang mengajukan izin pembangunan dalam dua tahun terakhir. Sebagian besar

¹ Kurniasari Dwi,dkk,2011. Estimasi Luasan Dan Distribusi Ruang Terbuka Hijau Dalam Menurunkan Suhu Udara Mikro Di Kota Yogyakarta, Jurnal Penelitian BAPEDDA Yogyakarta.

² Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Kota Yogyakarta, 2011.

berlokasi di tempat wisata utama Kota Yogyakarta yaitu di seputaran Malioboro. Selain hotel, juga akan ada pembangunan sejumlah kondotel di Gondokusuman dan di Yogyakarta bagian selatan . Sebagian besar sudah dalam proses pembangunan³, peristiwa ini menegaskan kembali posisi Kota Yogyakarta sekarang yang semakin pesat akan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan hotel-hotel mewah yang mewabah dipusat kota dan tempat-tempat strategis pariwisata. Meningkatnya pembangunan fisik kota tersebut, pertumbuhan penduduk serta berbagai aktivitas kota lainnya berbanding terbalik dengan kenyamanan yang dirasakan sekarang, slogan '*Jogja Berhati Nyaman*' pelan-pelan semakin meredup dan hamper tidak dirisakana lagi terutama dari sisi kesejukan alamnya. Hal ini terbukti dengan meningkatnya suhu kenaikan temperatur yang merupakan cerminan perubahan iklim mikro di wilayah Yogyakarta, dengan temperatur rata-rata lebih tinggi 4°C dari daerah pinggiran kota⁴, telah memberikan suatu gambaran yang nyata dan tegas adanya penurunan kuantitas lahan terbuka di Kota Yogyakarta, serta lahan-lahan kosong potensial yang selama ini cukup tersedia menjadi semakin menurun dan sangat memprihatinkan, masyarakat Kota Yogyakarta mulai merindukan suasana kota yang hijau, asri, nyaman, dan bersahabat sesuai dengan slogan yang ada. Sehingga keberadaan Ruang terbuka hijau menjadi pekerjaan rumah bagi semua stakeholders wabil khusus bagi pemerintah daerah setempat.

³ Sitem Jaringan Komunikasi dan Informasi, 2013. Bagian Hukum Pemda Kota Yogyakarta.

⁴ Kurniasari Dwi,dkk,2011. Estimasi Luasan Dan Distribusi Ruang Terbuka Hijau Dalam Menurunkan Suhu Udara Mikro Di Kota Yogyakarta, Jurnal Penelitian BAPEDDA Yogyakarta.

Kondisi lahan terbangun dan lahan tidak terbangun di kota Yogyakarta sudah tidak seimbang. Penggunaan lahan sebagai area pemukiman sebesar 72% jauh melebihi keadaan optimal sebesar 40%. Sedangkan luasan RTH hanya sebesar 4,6% yang seharusnya sebesar 20-32%⁵. Untuk mengatasi adanya perubahan fenomena di atas yang telah memberikan berbagai perubahan ke arah negatif baik pada aspek lingkungan biotis dan sosial, diperlukan adanya mitigasi dalam mempertahankan keberadaan, distribusi maupun memperluas RTH. Mengingat bahwa kepadatan pemukiman dan lalu lintas di wilayah perkotaan sangat variatif. Perbedaan ini menuntut adanya pola sebaran ruang terbuka yang seimbang antara luasan dan kepadatan. Sehingga harapan untuk menciptakan suatu lingkungan perkotaan yang asri dan nyaman secara ekologis akan dapat tercapai.

Penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang serius, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan social serta ruang terbuka publik. Keberadaan ruang terbuka publik pada kawasan-kawasan permukiman merupakan kebutuhan mendasar yang harus ada dan disediakan untuk masyarakat. Ruang terbuka publik tersebut menjadi tempat untuk berkumpul masyarakat, mengadakan pertunjukan kesenian untuk perayaan tertentu, bertemu dengan teman atau tetangga, tempat bermain, atau hanya melewatkan waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Dari total luas wilayah Yogyakarta yang mencapai 3.250 hektar, sekitar 20% diharuskan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) publik

⁵ Ibid

dan 10% lainnya ruang terbuka hijau (RTH) privat yang pengembangannya dilakukan oleh pihak swasta maupun masyarakat.

Jika menurut kepada luas Kota Yogyakarta, areal publik yang seharusnya dibangun di daerah ini mencapai 650 hektar. Sedangkan pada kenyataannya Ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Yogyakarta masih kurang dan belum memenuhi dari standar ruang terbuka untuk kawasan perkotaan dimana ruang terbuka hijau (RTH) publik yang dibangun pemerintah masih kurang dari 20 persen atau hanya 18,96 persen dari luas wilayah Kota Yogyakarta⁶ atau sekitar 616,2 hektar. Kurangnya pembangunan RTH publik di wilayah kota salah satunya diakibatkan karena keterbatasan lahan yang bisa digarap untuk pembangunan RTH tersebut. Dari 18,96 persen RTH itu tersebar di beberapa kelurahan dan kecamatan, yaitu ; giwangan 80m², sorosutan 40m², suryatmajan 64m², tegalpanggung 193m², bener 90m², kricak 113m², karangwaru 72m², tegal rejo 60m², bumijo 303m², ngampilan 222m², prawirodirjan 26m², ngupasan 80m, notopajan 76m, tegal rejo 44m, baciro 80m², kota baru 415m², klitren 134m². selain itu juga RTH tersebar juga di beberapa kecamatan yaitu ; kecamatan mantrijeron 330m², kraton 324m², mergangsan 357m² umbulharjo 1561m², kotagede 330m², gondokusuman 750m², danuraden 294m², pakualaman 176m², gondomanan 152m², ngampilan 152m², wirobrajan 345m², gedong tengen 162m², jetis 231m², tegal rejo 380m². Dan terdapat juga RTH di beberapa ruas jalan perkotaan yaitu ; jalan cik di tiro 2.500m², jalan prof. yohanes 1.444m², jalan kusbini 100m², jalan dr.wahidin

⁶Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2014.

100m², jalan abu bakar ali 250m², jalan Ipda tut harsono 300m², jalan veteran 300m², jalan gambiran 400m², giwangan 279m², dan redjowinganun 229m²

Berdasarkan fungsinya, kehadiran ruang terbuka publik sangat penting di tengah kehidupan masyarakat. Fungsi utama ruang terbuka publik adalah sebagai ruang dinamis yang potensial sebagai tempat interaksi, komunikasi, aktivitas sosial, dan kebutuhan rekreasi. Ketersediaan ruang terbuka publik wajib ada baik pada tingkat kota maupun skala yang lebih kecil seperti kawasan perumahan. Untuk persyaratan luas wilayah, ditentukan bahwa ruang terbuka hijau bagi publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh luas wilayah kawasan perumahan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 34 tahun 2006). Pesatnya pembangunan permukiman di kawasan perkotaan semestinya seiring dengan penyediaan ruang terbuka publik. Namun yang terjadi selama ini, hal tersebut tidak seimbang sehingga ruang terbuka publik semakin sulit ditemukan pada kawasan permukiman padat.

Keterbatasan ruang terbuka publik memaksa masyarakat memanfaatkan setiap ruang yang sebetulnya kurang tepat untuk memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka. Sebagai contohnya adalah kebutuhan ruang untuk bermain. Salahsatu contohnya adalah menggunakan gang-gang dan tepi jalan raya atau kawasan pinggir rel kereta api untuk bermain. Lokasi tersebut kurang aman dan nyaman namun banyak dimanfaatkan warga masyarakat sebagai tempat bermain anak-anak.

Kebutuhan masyarakat baik anak-anak maupun dewasa akan ruang terbuka publik sangat mendesak untuk diadakan. Ruang terbuka dimaksud dapat

dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi antar warga masyarakat, tempat untuk bermain, olah raga (misalnya : senam, bulutangkis, volley dan sebagainya), tempat melakukan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, acara pentas kesenian, tempat pemungutan suara, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa keberadaan ruang terbuka publik sangat dibutuhkan masyarakat karena dapat bermanfaat sebagai tempat interaksi sosial dari seluruh lapisan masyarakat. Fungsi tersebut menjadi sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan toleransi antar warga masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari bahwa lahan di kawasan perkotaan sangat terbatas, sehingga bila tidak segera merespon dan mengambil kebijakan penyediaan lahan untuk ruang terbuka publik dikhawatirkan masyarakat akan sulit menemukan tempat bersosialisasi, berkomunikasi, dan bermain bagi anak-anak.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan lahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang terbuka publik di tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta. Kebijakan tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007- 2011. Setiap tahun Pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan pembelian tanah untuk penyediaan ruang terbuka publik. Mulai tahun 2006 sampai tahun 2011 baruterdapat 27 lokasi di 26 kelurahan yang mempunyai ruang terbuka publik dari total 45 kelurahan di Kota Yogyakarta,

sehingga sisanya yang belum difasilitasi dimasukkan dalam RPJMD Tahun 2012-2016 Masyarakat Kota (LPMK).

Sehingga penulis mengharapkan hasil dari penelitian dan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam penerapan Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007, Peraturan Walikota Yogyakarta No. 05 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dan dapat memberikan kontribusi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012- 2016, serta meningkatkan kenyamanan hunian kota Yogyakarta dari semua aspek terutama di pandang dari segi lingkungan udara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang muncul dan yang akan diteliti oleh penulis, sebagai berikut:

Strategi apa saja yang akan diterapkan oleh Pemerintah kota Yogyakarta dalam memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau tahun 2014-2015?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dan karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui secara jelas dan rinci keadaan dan kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta;
2. Memahami dengan jelas serta mengetahui pemaparan yang terstruktur strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta dalam memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau tahun 2014-2015.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan untuk kembali mengingatkan kesemua pihak bagaimana keadaan Kota Yogyakarta sekarang yang semakin kompleks dan berimbas pada kenyamanan yang asri, sehingga perlu kesadaran bersama untuk memaksimalkan RTH.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat praktis untuk lembaga (Pemerintah Kota Yogyakarta)

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun regulasi pengelolaan ruang terbuka hijau yang lebih maksimal.

b. Manfaat praktis untuk masyarakat

Memberikan pemahaman akan pentingnya keberadaan RTH yang maksimal dalam keberlanjutan keseharian untuk menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman. Serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

c. Manfaat praktis bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan meningkatkan keterampilan atau kualitas dalam praktik bagi peneliti. Terutama mengenai, penerapan strategi dalam memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori yang dimaksud adalah teori-teori yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian. Agar relevan dengan penelitian dan sebagai landasan pikir dalam pemecahan masalahnya.

Untuk memperoleh kesatuan penafsiran istilah-istilah yang terdapat dalam isi skripsi, maka penulis akan menyajikan landasan teori yang berhubungan langsung dengan bidang yang akan dikaji. Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Strategis

1.1 Pengertian Manajemen Strategis

Sebuah pemerintahan tentunya mempunyai sebuah susunan atau sering di sebut Manajemen strategis yaitu merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan.

a. Manajemen strategis

Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategis (strategis atau

perencanaan jangka panjang), implementasi strategi dan, dan evaluasi pengendalian

Beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian Manajemen Strategi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fred R David Mendefinisikan Manajemen Strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.⁷
- 2) Hadari Nawawi menyatakan bahwa Manajemen strategik adalah perencanaan berskala besar (disebut Perencanaan Strategik) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut VISI), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut MISI), dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan Operasional) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut Tujuan Strategik) dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional) organisasi⁸

⁷ Fred R.David, *Strategic Management : Manajemen Strategis*, Salemba Empat, Jakarta, hal 16-17

⁸ Hadari Nawawi 2005.*Manajemen Strategik*, Gadjah Mada Pers : Yogyakarta

⁹ J.David Hungr dan Thomas L. Wheelen "*Manajemen Strategis*"hal 27

3) Menurut L.H. Walson dan Oey Liang Lie, Manajemen dikatakan sebagai ilmu dan seni. Sebagaimana ilmu karena manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran-kebenaran yang universal. Sebagai ilmu, manajemen memiliki asas-asas seperti ilmu lainnya yang disebut asas manajemen. Manajemen dinyatakan sebagai seni karena keberhasilan pemimpin dalam usahanya mencapai tujuan dengan bantuan bawahan, selain itu diperlukan pemahaman dan pengalaman ilmu manajemen⁹

1.2 Manfaat Manajemen Strategis

Manajemen strategis memiliki peran yang sangat signifikan dimana sangat memungkinkan suatu organisasi untuk lebih proaktif ketimbang reaktif dalam membentuk masa depan sendiri, sehingga hal itu dapat memicu suatu organisasi untuk mengawali dan mempengaruhi aktivitas sehingga dapat mengendalikan dan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Secara garis besar manfaat manajemen strategis dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Manfaat Finansial; Organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam tendensi untuk menaikkan tingkat keuntungan, profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan organisasi tanpa aktivitas perencanaan yang sistematis.

b) Manfaat Non-Finansial

1. Menyiapkan pandangan terhadap manajemen problem
2. Menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi dan antusias untuk menghadapi masalah dan peluang
3. Memungkinkan keputusan utama untuk mendukung tujuan yang ditetapkan
4. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk mengidentifikasi peluang
5. Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal diantara staff

1.3 Tahap-tahap Manajemen Strategis

Mengingat perumusan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model manajemen strategis, maka dalam menganalisisnya yang digunakan adalah urutan proses analisis yang mengacu pada model tersebut.

1) Identifikasi Mandat Dan Misi Organisasi

Mandat merupakan apa yang diharuskan dan diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi otoritasnya termasuk yang diharapkan dari masyarakat lokal sendiri. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga didirikan atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan apa yang dikerjakan. Mandat dari sisi

iniilah yang digunakan sebagai titik tolak dalam mengukur kinerja organisasi tersebut.

2) Analisis Lingkungan Strategis

Untuk merespon secara efektif terhadap perubahan lingkungannya, organisasi publik harus memahami lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Sehingga mereka dapat mengembangkan strategi yang efektif dan mengaitkan kedua lingkungan tersebut.

Pemahaman atas lingkungan internal berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang dan tantangan. Pemahaman atas kedua kondisi tersebut digunakan sebagai pijakan dalam analisis SWOT (*Strength, weakness, opportunities, threats*) untuk merumuskan isu strategis pada tahapan analisis berikutnya. Analisis lingkungan internal dilakukan terhadap, sebagai berikut:

- a) Sumber data yang dimiliki, meliputi: Sumber daya manusia, dana, sarana, fasilitas, struktur dan budaya organisasi
- b) Strategis yang sedang digunakan dalam mengelola input
- c) Kinerja yan dicapai saat ini.

Internal adalah sikap kemampuan kerja pimpinan, staf, dan karyawan. Bisa juga dikatakan lingkungan internal itu sebenarnya adalah situasi didalam organisasi yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi baik didalam segi operasional

maupun manajerial. Analisis lingkungan eksternal dilakukan melalui, sebagai berikut:

- d) Pemantauan terhadap ragam kecenderungan dan kekuatan politik, sosial, teknologi, fisik dan pendidikan.
- e) Mengamati stakeholder luar yang berpengaruh client, costumers, dan para pembuat kebijakan (legislatif).
- f) Mengamati competitor dan collaborators yang ada.

Sebuah organisasi harus bisa melihat lingkungan internal dan eksternal yang dari kedua lingkungan itu akan dapat dilihat peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan dari organisasi tersebut dan staff harus dapat mengidentifikasi isu yang ada agar organisasi cepat tanggap didalam ataupun diluar lingkungan organisasi.

Sebuah organisasi dapat mengembangkan lebih dari satu kebijakan dalam menagani hal penting yang terjadi dalam organisasi tersebut, namun kebijakan tidak langsung memberitahu atasan cara menangani suatu promosi tertentu. Kebijakan strategi membatasi atasan dalam sebagian besar masalah saja, tidak seluruhnya, serta berfungsi sebagai pedoman bagi atasan tingkat menengah dan atasan penyedia (*supervisor*) dalam membuat pilihan tertentu.Strategi kebijakan disusun untuk memastikan bahwa:

1. Melaksanakan keputusan strategis

2. Adanya suatu dasar pengendalian, Waktu yang digunakan dalam mengambil keputusan hemat
3. Situasi yang sama ditangani dengan konsisten
4. Koordinasi antar unit dapat terjadi kapan saja.

3) Analisis isu strategis

Pengidentifikasian isu strategis merupakan inti dari perencanaan strategis. Dalam mengidentifikasi isu strategis studi ini menggunakan pendekatan langsung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan memahami visi dan misi
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang serta ancaman
- c. Mengidentifikasi isu-isu strategisnya

4) Analisis kritikal isu strategis

Proses mengidentifikasi isu strategis merupakan suatu proses yang cukup rumit, sehingga perlu dilakukan berbagai pengujian lebih lanjut terhadap isu-isu strategis yang lebih berhasil diidentifikasi, untuk itu diperlukan alat ukur untuk melihat seberapa strategis isu tersebut, sehingga terjaring isu-isu yang benar-benar strategis.

Pada dasarnya strategi merupakan garis besar respon sebuah organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena itu, strategi harus dirumuskan selaras dengan isu startegis yang telah diidentifikasi. Dalam perumusan strategis ini dilakukan pendekatan dengan empat tahapan perumusan strategis, yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi alternatif-alternatif umum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu strategis.
2. Mempelajari kendala-kendala yang kemungkinan muncul dalam pelaksanaan alternatif tersebut.
3. Merumuskan usulan-usulan utama yang dapat digunakan untuk mewujudkan alternatif-alternatif tersebut, sekaligus mengantisipasi kemungkinan kendala-kendala yang ada.
4. Merumuskan kegiatan utama apa yang harus dilakukan dalam beberapa tahun kedepan.

Dalam proses perumusan strategi terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yaitu terletak pada pembuat keputusan, misalnya tekanan-tekanan politik, sosial, kondisi ekonomi, persyaratan prosedural, komitmen, waktu yang terbatas dan banyak lagi lainnya. Nilai-nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan perilaku para pembuat keputusan adalah sebagai berikut⁹:

a) Nilai-nilai politik

Stakeholders atau para pembuat keputusan memang sering kali dalam menilai atau mengidentifikasi serta dalam menetapkan alternatif-alternatif kebijakan berdasarkan pada kepentingan-kepentingan partai politik beserta kelompok kepentingannya. Jadi keputusan yang diambil adalah keputusan

⁹ Atik Septi Winarsih, *Diklat Mata Kuliah Studi Implementasi Kebijakan (Bab Perumusan Strategi)*, Yogyakarta

yang didasarkan pada keuntungan politik dan hal tersebut sering dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan partai politik atau tujuan-tujuan kelompok kepentingan tertentu.

b) Nilai-nilai organisasi.

Para pembuat keputusan atau kebijakan dalam proses formulasi kebijakan khususnya para birokrat mungkin dipengaruhi pada nilai-nilai organisasi, seperti badan administrasi menggunakan banyak imbalan dan sanksi dalam usahanya untuk mempengaruhi anggotanya menerima dan bertindak atas dasar nilai-nilai organisasi yang telah ditentukan, keputusan individu mungkin diarahkan oleh pertimbangan semacam keinginan-keinginan untuk melihat organisasi tetap hidup, untuk memperbesar program, kegiatan serta untuk mempertahankan kekuasaannya dan hak-hak istimewa.

c) Nilai-nilai pribadi.

Nilai-nilai pribadi dimungkinkan bisa mempengaruhi setiap aktor dalam pengambilan keputusan sebuah kebijakan publik, nilai-nilai pribadi yang dimaksud adalah usaha untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi, kedudukan sejarah seseorang mungkin pula merupakan kriteria keputusan seorang politisi yang menerima suap untuk membuat keputusan tertentu, seperti pemberian

lisensi atau kontrak menjadi contoh konkrit bagaimanabila nilai pribadi berpengaruh dalam pembuatan keputusan.

d) Nilai-nilai kebijaksanaan

Nilai-nilai kebijaksanaan digunakan oleh para stakeholders atau para pembuat keputusan untuk bertindak sesuai dasar persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat umum atau kepercayaan mengenai apa yang merupakan kebijakan publik secara moral dan benar atau pantas. Jadi, para pejabat atau para stakeholders memutuskan kebijakan karena kebijakan tersebut sesuai dengan kepercayaan bahwa hal itu merupakan kepentingan umum.

2. Pemerintah Daerah

2.1 Pengertian Pemerintah Daerah.

Sebuah kota tentunya memiliki seorang atau beberapa kelompok orang untuk dapat mengatur atau memimpin suatu tempat. Sama halnya seperti kota Yogyakarta, tentunya juga memiliki seorang pemimpin kota yang di sebut Gubernur dan pemimpin daerah yang di sebut Bupati. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah merupakan aparatur negara yang bertugas atau berwenang disalah

satu daerah kesatuan batas hukum wilayah tertentu, yang memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁰

Fokus pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Yogyakarta yang merupakan salah unsur pelaksana otonomi daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi:

*“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang ”.*¹¹

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

*“Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat ”.*¹²

Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2004

¹⁰ <http://demokrasi.indonesia.co.id/2014/10/sistem-pemerintahan-daerah-otonomi.html> diakses senin, 20/11/2014 pukul 15.30 WIB.

¹¹ <http://www.dpr.go.id/uu/uu1945>, diakses pada senin, 20/11/2014 pukul 20.00 WIB.

¹² Ibid

“Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”¹³

2.2 Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16

¹³ Ibid

buah urusan, yaitu sebagai berikut : Perencanaan dan pengendalian pembangunan, Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana umum, Penanganan bidang kesehatan, Penyelenggaraan pendidikan, Penanggulangan masalah social, Pelayanan bidang ketenagakerjaan, Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pengendalian lingkungan hidup, Pelayanan pertanahan, Pelayanan kependudukan dan catatan sipil, Pelayanan administrasi umum pemerintahan, Pelayanan administrasi penanaman modal, Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Konteks wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 pasal 1 huruf a, b,c,d. Sebagaimana penjelasannya ialah :

“Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan penyelenggaraan penataan ruang meliputi : pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang Provinsi dan kawasan strategis provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota (pasal 1 huruf a). Pelaksanaan penataan runag provinsi (pasal 1 huruf b). Kerjasama penataan ruang antar provinsi (pasal 1 huruf d). Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi pemerintah daerah provinsi melaksanakan : penataan kawasan strategis provinsi (pasal 3 huruf a). Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi (pasal 3

huruf b). Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi (pasal 3 huruf c).¹⁴

Sedangkan konteks perencanaan tata ruang pemerintah lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 23 ayat 1, huruf a, b, c dan d Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Sebagaimana bunyi ayat ialah :

“ Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi (pasal 23 ayat 1 huruf a). Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi (ayat 1 huruf b). Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi (ayat 1 huruf c). Penetapan kawasan strategis provinsi (ayat 1 huruf d). ”¹⁵

Sementara konteks tentang penataan ruang wilayah kota ditegaskan pada paragraf 5 Undang-undang No 26 Tahun 2007, tentang penataan ruang sebagaimana penjelasannya dibawah ini :

“Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam pasal 26 ayat 1 ditambahkan : a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau dan; c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. ”¹⁶

¹⁴ Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 10. Hal 12-13

¹⁵ Ibid. Hal. 21.

¹⁶ Ibid. Hal. 25- 26

3. Ruang Terbuka Hijau

3.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Dijaman modern seperti ini khususnya di kota Yogyakarta dengan tingkat kepadatan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sangatlah membutuhkan Ruang Terbuka hijau sebagai sarana bersantai dan berkumpul, berinteraksi dengan orang lain di ruang terbuka.

Ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut (yaitu kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan)”¹⁷

Sementara, menurut Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang memberikan pengertian, bahwa :

“Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan/ mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.”¹⁸

Ruang terbuka ini terbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu atau berkomunikasi satu sama lain. Dalam satu kawasan permukiman baik yang tradisional maupun permukiman kota sering kita jumpai sebuah lahan kosong yang dijadikan sebagai ruang

¹⁷ Darhak, Hermanto.2006 arah pengembangan ruang terbuka hijau di perkotaan. Departemen pekerjaan umum. Hal 31

¹⁸ Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Hal 6

bersama bagi penghuni yang ada disekitarnya dengan jarak radius tertentu (Bappeda Tk. I Bali , 1992 : 28).¹⁹

Berdasarkan bentuk, macam dan fungsi, ruang terbuka dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu (Jayadinata, 1999 : 33) :

- a. Kebudayaan misalnya : lapang olah raga, kolam renang terbuka, taman, kampus universitas, dan sebagainya.
- b. Kehidupan ekonomi (mata pencaharian), misalnya : sawah, kebun, kolam, hutan, pasar, pelabuhan, dan sebagainya.
- c. Kehidupan sosial, misalnya : kawasan rumah sakit, kawasan perumnas, tanah lapang untuk latihan militer, danau untuk rekreasi berperahu, dan sebagainya.

3.2 Peran dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Dalam masalah perkotaan, RTH merupakan bagian atau salah satu subsistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan menjadi:

- 1) Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (“paru-paru kota”), pengatur iklim mikro, agar system sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air

¹⁹ <http://perilaku-manusia-pada-open-space.html> Kamis, 27/11/2014 pukul 21.30 WIB.

hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin.

- 2) Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian;
- 3) Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain;
- 4) Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik (dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan).

Tabel 1.1
Jenis, Fungsi, dan Tujuan Pembangunan RTH

JENIS RTH	FUNGSI LAHAN	TUJUAN	KETERANGAN
Taman Kota (termasuk: Taman Bermain Anak / Balita), Taman Bunga, (Lansia)	Ekologis, Rekreatif, Estetis, Olahraga (terbatas)	Keindahan (tajuk, tegakan pengarah, pengaman, pengisi dan pengalas), kurangi cemaran, meredam bising, perbaiki iklim mikro, daerah resapan, penyangga sistem kehidupan, kenyamanan.	Mutlak dibutuhkan bagi kota, keserasian, rekreasi aktif dan pasif, nuansa rekreatif, terjadinya keseimbangan mental (psikologis) dan fisik manusia, habitat, keseimbangan ekosistem.
Jalur sempadang (tepi)	Konservasi, Pencegahan	Perlindungan, mencegah okupansi penduduk,	Perlindungan total tepi kiri-kanan

Sungai dan pantai	Erosi, Penelitian	mudah menyebabkan erosi, iklim mikro, penahan 'badai'.	bantaran sungai (+/- 25-50 meter) rawan erosi. Taman Laut.
Taman Pemakaman (UMUM)	Pelayanan Publik (umum), Keindahan	Pelindung, pendukung ekosistem makro, 'ventilasi' dan 'pemersatu' ruang kota.	Dibutuhkan seluruh anggota masyarakat, menghilangkan rasa 'angker'.
Pertanian Kota	Produksi, Estetika, Pelayanan <i>Public</i> (umum)	Kenyamanan spasial, visual, audial dan thermal, ekonomi.	Peningkatan produktivitas budidaya tanaman pertanian.
Taman hutan kota perhutanan.	Konservasi, Pendidikan, Produksi	Pelayanan masyarakat dan penyangga lingkungan kota, wisata alam, rekreasi, produksi hasil 'hutan': iklim mikro, oksigen, ekonomi.	Pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati, pendidikan penelitian.
Taman situ, Danau, waduk, empang	Konservasi, Keamanan	Keseimbangan ekosistem, rekreasi (pemancingan).	Pelestarian SD-air, flora & fauna (budidaya ikan air tawar).
Kebun raya, kebun Binatang (Nursery)	Konservasi, Pendidikan, Penelitian	Keseimbangan ekosistem, rekreasi, ekonomi	Pelestarian plasma nutfah, elemen khusus Kota Besar, Kota Madya.
Taman purbakala	Konservasi, preservasi, Rekreasi	Reservasi, perlindungan situs, sejarah – <i>national character building</i> .	Bangunan' sebagai elemen taman.
Jalur hijau Pengamanan	Keamanan	Penunjang iklim mikro, thermal, estetika.	Pengaman: Jalur lalu-lintas, Rel KA, jalur listrik tegangan tinggi, kawasan industri, dan 'lokasi berbahaya' lain.
Taman rumah sekitar Bangunan gedung - tingkat	Keindahan, Produksi	Penunjang iklim mikro, 'pertanian subsistem': TOGA (tanaman obat keluarga)/Apotik Hidup,	Pemenuhan kebutuhan pribadi (<i>privacy</i>), penyaluran 'hobby'

'pekarangan'		Karangkitri (sayur dan buah-buahan).	pada lahan terbatas, mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara berkala dan 'subsistent'.
--------------	--	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Kota identik dengan deretan beranekaragam bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Bangunan perumahan, perkantoran, sarana umum seperti pasar atau pusat perbelanjaan, rumah sakit, terminal, jalan raya, tempat hiburan, dan lain-lain dibangun demi kepentingan manusia²⁰. Sebagian besar wilayah perkotaan di Indonesia mengalami kemunduran secara ekologis yang diakibatkan oleh ketidakharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan meningkatnya suhu udara di perkotaan, penurunan air tanah, banjir/genangan, penurunan permukaan tanah, intrusi air laut, abrasi pantai, pencemaran air oleh bakteri dan unsur logam, pencemaran udara seperti peningkatan debu, kadar Karbon Monoksida (CO), Ozon (O3), Karbon Dioksida (CO2), Oksida Nitrogen (NO) dan Belerang (SO), serta suasana yang gersang, monoton, bising, dan kotor²¹.

²⁰ <http://jembatan4.co.id/2013/10/perkembangan-dan-pembangunan-ruang.html> Senin, 01/12/2014 pukul 10.00 WIB.

²¹ Ibid

F. Definisi konseptual

1. Manajemen Strategis

Manajemen strategis merupakan keputusan atau tindakan yang diambil dengan perencanaan-perencanaan, pertimbangan, dan penyusunan yang efektif dalam membantu pencapaian sasaran dan tujuan sebuah organisasi. Manajemen strategis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manajemen yang dilakukan didalam lembaga Dinas Kebudayaan dan pariwisata Yogyakarta dalam upaya pelestarian benda cagar budaya sebagai bentuk kearifan lokal.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan aparatur negara yang bertugas atau berwenang disalah satu daerah kesatuan batas hukum wilayah tertentu, yang memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Fokus pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Yogyakarta yang merupakan salah unsur pelaksana otonomi daerah.

3. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau merupakan lahan penghijuan tumbuh-tumbuhan berbagai jenis dengan berbagai bentuk dan konsep yang beragam yang harus disediakan oleh pemerintah daerah terkait agar terpenuhinya kota atau daerah yang berwawasan lingkungan, asri, bersahaja, dan nyaman untuk dihuni.

G. Definisi operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur satu variabel atau dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur satu variabel.

Maka dari itu untuk memudahkan penelitian maka kami menggunakan definisi operasional dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Memaksimalkan RTH Tahun 2014-2015.

1) Tahapan Manajemen Strategis

- a. Tolok ukur/indikator : Identifikasi Mandat Dan Misi Organisasi
 - Tolok ukur dalam kinerja organisasi
 - Capaian tujuan
 - b. Tolok ukur/indikator : Analisis Lingkungan Strategis
 - Kekuatan sumber daya (SDM, dana, sarana, fasilitas, struktur dan budaya organisasi
 - Kinerja yan dicapai saat ini
 - Analisis SWOT
 - Strategi yang sedang digunakan dalam mengelola input
- 2) Analisis isu strategis. Tolok ukur/indikator .
- Memahami visi dan misi.
 - Identifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang serta ancaman

- Keterlibatan stakeholder luar yang berpengaruh client, costumers, dan para pembuat kebijakan (legislatif).
- Identifikasi isu-isu strategis

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif adalah untuk menggambarkan atau mencari hubungan yang terdapat pada suatu permasalahan yang bertujuan mengumpulkan data.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.” Jadi, penelitian dengan metode deskriptif merupakan penelitian yang akan mendeskripsikan atau menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri.

Sedangkan yang dimaksud Deskriptif Kualitatif yaitu suatu analisis data yang telah masuk, untuk kemudian diadakan pengelolaan data tersebut sehingga akan tersusun dalam bentuk pengurutan, gambaran, dan pengklasifikasian terhadap masalah – masalah yang sedang diteliti sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Unit Analisa

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti.

Unit Analisa juga merupakan objek yang digunakan dalam meneliti sebuah permasalahan atau fenomena untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah pada Pemerintah Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya pada Dinas BADAN LINGKUNGAN HIDUP dan Dinas Tata Kota dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang berkaitan dengan strategi memaksimalkan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak pada Dinas Tata Ruang Kota yang beralamat di Jl. Suroto No.11, Yogyakarta . Serta Dinas BADAN LINGKUNGAN HIDUP. Persoalan utama yang akan diteliti terkait kebijakan pemerintah setempat yang berkaitan dengan strategi pemerintah kota dalam memaksimalkan RTH Tahun 2014-2015.

4. Jenis Data

Karena yang digunakan adalah Metode Deskriptif yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek peneliti yang menggunakan alat pengukur atau pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang diperoleh, khususnya data dari Pemkot DIY yaitu Dinas Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diambil dari subyek penelitian. Baik berupa literature pendukung lainnya berupa buku, media massa, internet, arsip, dokumen dan lain sebagainya berkaitan dengan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan ada objek penelitian akan menggunakan tehnik – tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh pendapat Allport (dalam Hadi, 1992) berikut perlu dipertimbangkan:

“If we want to know how people feel, what their experience and what they remember, what their emotions and motives are like, and the reasons for acting as they do – why not ask them?”

Dari pendapat itu, kita mengetahui bahwa wawancara dapat atau lebih tepat digunakan untuk memperoleh data mengenai perasaan, pengalaman dan ingatan, emosi, motif, dan sejenisnya secara langsung dari subjeknya.

b. Dokumentasi

Merupakan langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data – data melalui dokumen atau catatan yang tersedia di dalam organisasi dengan materi yang diambil. Tinjauan pustaka dilakukan dengan melakukan tinjauan referensi buku dan searching internet yang berkaitan dengan data penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data digunakan setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit tertentu, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari seorang peneliti.

Secara garis besar, dikatakan bahwa analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami sehingga mencapai suatu kesimpulan yang tepat dan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa, grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart.

c. Penarikan Kesimpulan dan *Verification*

Langkah ke-tiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.